



**KOMPILASI**  
**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI II**  
**DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG**  
**PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-**  
**UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI**  
**UNDANG-UNDANG**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

## SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi II dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" ini dapat terselesaikan dengan baik.



Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menyusun anotasi perubahan pasal/ayat dalam undang-undang bidang komisi II yang mengalami perubahan, pencabutan, maupun penambahan norma melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah membatalkan UU Cipta Kerja secara inkonstitusional bersyarat, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) untuk mencabut UU Cipta Kerja. Perppu 2/2022 tersebut kemudian telah ditetapkan oleh DPR RI selaku pembentuk undang-undang menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kompilasi ini juga dilengkapi dengan informasi terkait sudah dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan pelaksanaannya oleh Pemerintah.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, Septemer 2023

Kepala Badan Keahlian,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
NIP. 196507101990031007

## KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir peraturan-peraturan pelaksana yang diamanatkan melalui Pasal/ayat pada suatu undang-undang.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berdampak pada perubahan 4 (empat) undang-undang di bidang Komisi II DPR RI, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah membatalkan UU Cipta Kerja secara inkonstitusional bersyarat, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) untuk mencabut UU Cipta Kerja. Perppu 2/2022 tersebut kemudian telah ditetapkan oleh DPR RI selaku pembentuk undang-undang menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari 4 (empat) undang-undang di bidang Komisi II DPR RI beserta perubahannya dalam UU Cipta Kerja yang kemudian telah dicabut melalui Perpu 2/2022 dan telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU 6/2023 yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksanaan undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

**Dra. Tanti Sumartini, M.Si.**

NIP.196310011988032001

## DAFTAR ISI

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI .....                                                                  | ii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                         | iii |
| DAFTAR ISI .....                                                                                             | iv  |
| DAFTAR PERATURAN PELAKSANA.....                                                                              | 1   |
| A. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA .....                                                       | 9   |
| B. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH<br>BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ..... | 16  |
| C. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN .....                              | 49  |
| D. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN<br>DAERAH.....                                     | 70  |

## DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

| NO.                       | PASAL                              | PERATURAN PELAKSANA                                                                                                      | CATATAN                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UU DESA</b>            |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| 1.                        | Pasal 117 angka 1 UU Cipta Kerja   | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.                                                 | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|                           | Pasal 1 <b>UU Desa</b>             | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 2.                        | Pasal 117 angka 2 UU Cipta Kerja   | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.                                                 | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|                           | Pasal 87 <b>UU Desa</b>            | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| <b>UU PENGADAAN TANAH</b> |                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| 3.                        | Pasal 123 angka 1 UU Cipta Kerja   | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|                           | Pasal 8 <b>UU Pengadaan Tanah</b>  | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 4.                        | Pasal 123 angka 2 UU Cipta Kerja   | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|                           | Pasal 10 <b>UU Pengadaan Tanah</b> | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 5.                        | Pasal 123 angka 3                  | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang                                                                         | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini                                                                                                                           |

| NO. | PASAL                            | PERATURAN PELAKSANA                                                                                                                                                                                           | CATATAN                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | UU Cipta Kerja                   | Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum                                                                                                                                       | meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023                                                        |
|     | Pasal 14 UU Pengadaan Tanah      | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| 6.  | Pasal 123 angka 4 UU Cipta Kerja | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum                                                                                      | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 19 UU Pengadaan Tanah      | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | Pasal 123 angka 5 UU Cipta Kerja | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum                                                                                      | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 19A UU Pengadaan Tanah     | -                                                                                                                                                                                                             | Pasal 19A merupakan pasal tambahan UU 11/2020                                                                                                                                    |
| 8.  | Pasal 123 angka 6 UU Cipta Kerja | Pasal 19B merupakan pasal tambahan UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pelaksana:<br><br>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 19B UU Pengadaan Tanah     | -                                                                                                                                                                                                             | Pasal 19B merupakan pasal tambahan UU 11/2020                                                                                                                                    |
| 9.  | Pasal 123 angka 7 UU Cipta Kerja | Pasal 19C merupakan pasal tambahan UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pelaksana:<br><br>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang                                                                         | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan                                         |

| NO. | PASAL                             | PERATURAN PELAKSANA                                                                                                      | CATATAN                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum                                                  | sebagai undang-undang melalui UU 6/2023                                                                                                                                          |
|     | Pasal 19C UU Pengadaan Tanah      | -                                                                                                                        | Pasal 19C merupakan pasal tambahan UU 11/2020                                                                                                                                    |
| 10. | Pasal 123 angka 8 UU Cipta Kerja  | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 24 UU Pengadaan Tanah       | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 11. | Pasal 123 angka 9 UU Cipta Kerja  | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 28 UU Pengadaan Tanah       | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 12. | Pasal 123 angka 10 UU Cipta Kerja | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 34 UU Pengadaan Tanah       | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksanan                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| 13. | Pasal 123 angka 11 UU Cipta Kerja | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 36 UU                       | Tidak mengamanatkan Peraturan                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |

| NO.                                 | PASAL                                        | PERATURAN PELAKSANA                                                                                                      | CATATAN                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Pengadaan Tanah</b>                       | Pelaksana                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |
| 14.                                 | Pasal 123 angka 12 UU Cipta Kerja            | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|                                     | Pasal 42 UU <b>Pengadaan Tanah</b>           | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 15.                                 | Pasal 123 angka 13 UU Cipta Kerja            | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|                                     | Pasal 46 UU <b>Pengadaan Tanah</b>           | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| <b>UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b> |                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| 16.                                 | Pasal 175 angka 1 UU Cipta Kerja             | Belum menerbitkan Peraturan Pelaksana                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Pasal 1 UU <b>Administrasi Pemerintahan</b>  | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 17.                                 | Pasal 175 angka 2 UU Cipta Kerja             | Belum menerbitkan Peraturan Pelaksana                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Pasal 24 UU <b>Administrasi Pemerintahan</b> | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 18.                                 | Pasal 175 angka 3 UU Cipta Kerja             | Belum menerbitkan Peraturan Pelaksana                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Pasal 38 UU <b>Administrasi Pemerintahan</b> | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 19.                                 | Pasal 175 angka 4 UU Cipta Kerja             | Belum menerbitkan Peraturan Pelaksana                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|                                     | Pasal 39 UU                                  | Tidak mengamanatkan Peraturan                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |

| NO.             | PASAL                                         | PERATURAN PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <b>Administrasi Pemerintahan</b>              | Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20.             | Pasal 175 angka 5 UU Cipta Kerja              | Belum menerbitkan Peraturan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | Pasal 39A UU <b>Administrasi Pemerintahan</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Pasal 39A merupakan Pasal tambahan UU Cipta Kerja meskipun telah dicabut melalui UU 6/2023.</p> <p>Ketentuan telah dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> |
| 21.             | Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja              | Belum menerbitkan Peraturan Pelaksananya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | Pasal 53 UU <b>Administrasi Pemerintahan</b>  | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UU PEMDA</b> |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22.             | Pasal 176 angka 1 UU Cipta Kerja              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah</li> </ul> | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023                                                                                                              |
|                 | Pasal 16 UU <b>Pemda</b>                      | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23.             | Pasal 176 angka 2 UU Cipta Kerja              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan</li> </ul>                             | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023                                                                                                              |

| NO. | PASAL                            | PERATURAN PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATATAN                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  | Berusaha dan Layanan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
|     | Pasal 250 UU Pemda               | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| 24. | Pasal 176 angka 3 UU Cipta Kerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah</li> </ul> | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 251 UU Pemda               | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| 26. | Pasal 176 angka 4 UU Cipta Kerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah</li> </ul> | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 252 UU Pemda               | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| 27. | Pasal 176 angka 5 UU Cipta Kerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah</li> </ul> | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 260 UU Pemda               | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| 28. | Pasal 176 angka 6 UU Cipta Kerja | Pasal 292A merupakan pasal tambahan UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pelaksana:                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah                                                                                             |

| NO. | PASAL                            | PERATURAN PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATATAN                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah</li> </ul> | dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023                                                                                      |
|     | Pasal 292A UU Pemda              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasal 292A merupakan pasal tambahan UU Cipta Kerja                                                                                                                               |
| 29. | Pasal 176 angka 7 UU Cipta Kerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah</li> </ul> | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 300 UU Pemda               | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| 30. | Pasal 176 angka 8 UU Cipta Kerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah</li> </ul> | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 349 UU Pemda               | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| 31. | Pasal 176 angka 9 UU Cipta Kerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan</li> </ul>                                                                               | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |

| NO. | PASAL                             | PERATURAN PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATATAN                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|     | Pasal 350 UU Pemda                | Tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
| 32. | Pasal 176 angka 10 UU Cipta Kerja | <p>Pasal 402A merupakan pasal tambahan dalam UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah</li> </ul> | Peraturan pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini meskipun UU Cipta Kerja telah dicabut melalui Perppu 2/2022 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU 6/2023 |
|     | Pasal 402A UU Pemda               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 402A merupakan pasal tambahan UU Cipta Kerja                                                                                                                               |

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI II DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

Sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, terdapat beberapa undang-undang bidang Komisi II yang telah mengalami perubahan dalam materi muatannya. Namun pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil UU Cipta Kerja, Mahkamah telah membatalkan UU Cipta Kerja secara inkonstitusional bersyarat. Guna melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pemerintah melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja melalui **penggantian** terhadap UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Perppu 2/2022 tersebut selanjutnya telah ditetapkan oleh DPR RI menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Oleh karena itu, dokumen Kompilasi ini akan berisikan Kompilasi UU Bidang Komisi II dalam UU 6/2023 yang telah mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

## A. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

### Pasal 117

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) diubah sebagai berikut:

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

| UU Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui | 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik | 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik |

| UU Desa                                                                                                                                                                                                                                     | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                           | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.                                                                                                                                                                 | Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                           | Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.                                                                           | 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.                                                                                    | 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.                                                                                    |
| 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.                                                                                              | 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.                                                                                                  | 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.                                                                                                  |
| 4. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. | 4. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.          | 4. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.          |
| 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal                 | 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. | 5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. |

| UU Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yang bersifat strategis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. | 6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. | 6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. |
| 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.                                                                                                                                                                                      | 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.                                                                                                                                                                                            | 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.                                                                                                                                                                                          |
| 8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.                                                                                                                                                                                                               | 8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.                                                                                                                                                                                                                     | 8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,                                                                                                                            | 9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan                                                                                                   | 9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan                                                                                                                      |

| UU Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ekonomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sosial, dan kegiatan ekonomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.                                                                                                                                                                          | 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.                                                                                                                                                                          | 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa                                                                                                                                                                           |
| 11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.                                                                                                                                                                               | 11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.                                                                                                                                                                               | 11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.                                                                                                                                                                               |
| 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. | 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. | 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. |
| 13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| UU Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.                                                                                                                                                                                                                 | <b>memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b>                                                                                                                                                                                                           | memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia <b>yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</b>                                                                                                                                                             |
| 14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| 15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.                                                                                                                                                                                                                             | 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.                                                                                                                                                                                | 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.                                                                                                                                                                                |
| 16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## BAB X BADAN USAHA MILIK DESA

### Pasal 87

| UU Desa                                                                                                                              | UU 11/2020                                                                                                                                                               | UU 6/2023                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Desa dapat mendirikan <b>Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.</b>                                                       | (1) Desa dapat <b>mendirikan BUM Desa.</b>                                                                                                                               | (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.                                                                                                                   |
| (2) BUM Desa <b>dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.</b>                                                      | (2) BUM Desa <b>sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</b> dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.                                                       | (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.                                           |
| (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                     | (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                  |
|                                                                                                                                      | (4) BUM Desa <b>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.</b>                                     | (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.                         |
|                                                                                                                                      | (5) <b>Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>1</sup>.</b> | (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. |

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 87

| UU Desa                                                  | UU 11/2020                                               | UU 6/2023                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ayat (1)<br>BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk | Ayat (1)<br>BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk | Ayat (1)<br>BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk |

<sup>1</sup> Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah dengan Pasal 117 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

| UU Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti <b>perseroan terbatas, CV, atau koperasi</b>. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat</p> | <p>mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti <b>perseroan terbatas, atau koperasi</b>. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada</p> | <p>mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

| UU Desa                                                                                                                      | UU 11/2020                                                                                                                                                                         | UU 6/2023                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. | saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| Ayat (2)<br>Cukup jelas.                                                                                                     | Ayat (2)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                           | Ayat (2)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                           |
| Ayat (3)<br>Cukup jelas.                                                                                                     | Ayat (3)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                           | Ayat (3)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              | Ayat (4)<br>Dalam rangka keterpaduan pembangunan daerah, BUM Desa dan unit usaha dibawahnya dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan rencana induk pembangunan daerah. | Ayat (4)<br>Dalam rangka keterpaduan pembangunan daerah, BUM Desa dan unit usaha dibawahnya dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan rencana induk pembangunan daerah. |
|                                                                                                                              | Ayat (5)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                           | Ayat (5)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                           |

## B. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

### Pasal 123

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah menjadi sebagai berikut:

### BAB III POKOK-POKOK PENGADAAN TANAH

## Pasal 8

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                        | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. | (1) Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.                                                                                                                                                                                                              | (1) Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                           | (2) Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi. | (2) Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, <b>badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah</b> , penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi. |
|                                                                                                                                           | (3) Penyelesaian perubahan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.                                                                                                                  | (3) Penyelesaian perubahan <b>kawasan</b> hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.                                                                                                                   |
|                                                                                                                                           | (4) Perubahan obyek Pengadaan Tanah yang masuk dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4) Perubahan <b>Objek</b> Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| UU Pengadaan Tanah | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat dilakukan melalui mekanisme:</p> <p>a. Pelepasan kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Instansi; atau</p> <p>b. Pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.</p> | <p>hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat dilakukan melalui mekanisme:</p> <p>a. <b>pelepasan</b> kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh Instansi; atau</p> <p>b. <b>pelepasan</b> kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta.</p> |

#### BAB IV PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 10

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                             | UU 11/2020                                                                                                   | UU 6/2023                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:</p> <p>a. pertahanan dan keamanan</p> | <p>Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:</p> | <p>Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)</p> |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>nasional;</p> <p>b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;</p> <p>c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, <b>saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</b></p> <p>d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;</p> <p>e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;</p> <p>f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;</p> <p>g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;</p> <p>h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;</p> <p>i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;</p> <p>j. fasilitas keselamatan umum;</p> <p>k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;</p> <p>l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;</p> <p>m. Cagar alam dan cagar budaya;</p> <p>n. <b>kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;</b></p> <p>o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;</p> <p>p. prasarana pendidikan atau sekolah <b>Pemerintah/Pemerintah Daerah;</b></p> <p>q. prasarana olahraga <b>Pemerintah/Pemerintah Daerah;</b> dan</p> <p>r. pasar umum dan lapangan parkir umum.</p> | <p>a. pertahanan dan keamanan nasional;</p> <p>b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;</p> <p>c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, <b>saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;</b></p> <p>d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;</p> <p>e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;</p> <p>f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;</p> <p>g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;</p> <p>h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;</p> <p>i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>j. fasilitas keselamatan umum;</p> <p>k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;</p> <p>m. cagar alam dan cagar budaya;</p> <p>n. <b>kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;</b></p> <p>o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa <b>termasuk untuk</b></p> | <p>digunakan untuk pembangunan:</p> <p>a. pertahanan dan keamanan nasional;</p> <p>b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;</p> <p>c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan <b>sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</b></p> <p>d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;</p> <p>e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;</p> <p>f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;</p> <p>g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;</p> <p>h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;</p> <p>i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah</p> |

| UU Pengadaan Tanah | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p><b>pembangunan rumah umum dan rumah khusus;</b></p> <p>p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>r. pasar umum dan lapangan parkir umum;</p> <p>s. <b>kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;</b></p> <p>t. <b>kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;</b></p> <p>u. <b>kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;</b></p> <p>v. <b>kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;</b></p> <p>w. <b>kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,</b></p> | <p>Daerah;</p> <p>j. fasilitas keselamatan umum;</p> <p>k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;</p> <p>m. cagar alam dan cagar budaya;</p> <p>n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;</p> <p>o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;</p> <p>p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>q. prasarana olahraga</p> |

| UU Pengadaan Tanah | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                            | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah; dan</p> <p>x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah.</p> | <p>Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>r. pasar umum dan lapangan parkir umum;</p> <p>s. kawasan <b>industri hulu dan hilir minyak dan gas</b> yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, <b>badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</b></p> <p>t. kawasan <b>ekonomi khusus</b> yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, <b>badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</b></p> <p>u. kawasan <b>industri</b> yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, <b>badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</b></p> <p>v. kawasan <b>pariwisata</b> yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah</p> |

| UU Pengadaan Tanah | UU 11/2020 | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            | <p>Fusat, Pemerintah Daerah, <b>badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</b></p> <p>w. kawasan <b>ketahanan pangan</b> yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, <b>badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</b></p> <p>x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, <b>badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.</b></p> |

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan Pengadaan Tanah**

**Pasal 14**

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                          | UU 11/2020                                                                                                                                                       | UU 6/2023                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum <b>menurut ketentuan peraturan perundang-</b> | (1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum <b>dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan</b> | (1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>undangan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Umum dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b>                                                                                                                                            |
| (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, <b>Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.</b> | (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, <b>Rencana Strategis, dan/atau Rencana Kerja Pemerintah/ instansi yang bersangkutan.</b> | (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, <b>dan/atau Rencana Kerja Pemerintah/ Instansi yang bersangkutan.</b> |

**Bagian Ketiga**  
**Persiapan Pengadaan Tanah**

**Pasal 19**

| UU Pengadaan Tanah                               | UU 11/2020                                       | UU 6/2023                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| (1) <b>Konsultasi Publik rencana pembangunan</b> | (1) <b>Konsultasi Publik rencana pembangunan</b> | (1) Konsultasi Publik rencana |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                          | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.                                                                                                  | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari:<br>a. Pihak yang Berhak;<br>b. Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah; dan<br>c. Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.                                                                                 | pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari:<br>a. Pihak yang Berhak;<br>b. pengelola barang milik negara/barang milik daerah; dan<br>c. pengguna barang milik negara/barang milik daerah.                                                                      |
| (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. | (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. | (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, pengelola barang milik negara/barang milik daerah, pengguna barang milik negara/barang milik daerah, dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati. |
| (3) Pelibatan Pihak yang Berhak sebagaimana                                                                                                                                                                                                 | (3) Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3) Pelibatan Pihak yang Berhak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>UU Pengadaan Tanah</b>                                                                                                                     | <b>UU 11/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>UU 6/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan. | Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah atas lokasi rencana pembangunan.                                                   | pengelola barang milik negara/barang milik daerah, dan Pengguna Barang milik negara/barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, pengelola barang milik negara/barang milik daerah, dan pengguna barang milik negara/barang milik daerah atas lokasi rencana pembangunan. |
| (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.                                          | (4) Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah atas lokasi rencana pembangunan. | (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                    | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.                                                                 | (5) Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah atas lokasi rencana pembangunan. | (6) Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.                                                           |
| (6) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah. | (7) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.                                                                                                                                                                                   | (8) Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah. |
|                                                                                                                                                                                                                       | (9) Pihak yang Berhak, Pengelola Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan Pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah yang tidak menghadiri Konsultasi Publik setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut dianggap menyetujui                                                                                                                                                            | (7) Pihak yang Berhak, pengelola barang milik negara/barang milik daerah, dan pengguna barang milik negaraf barang milik daerah yang tidak menghadiri Konsultasi Publik                                         |

| UU Pengadaan Tanah | UU 11/2020                                                                                                                          | UU 6/2023                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).                                                                             | setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut dianggap menyetujui rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).             |
|                    | (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . | (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <u>Peraturan Pemerintah</u> . |

**Pasal 19A<sup>2</sup>**

| UU 11/2020                                                                                                                                                                                                               | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektare dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak. | (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektare dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak. |
| (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kesesuaian tata rulang wilayah.                                                                              | (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kesesuaian tata ruang wilayah.                                                                               |

**Pasal 19B<sup>3</sup>**

| UU 11/2020                                  | UU 6/2023                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Dalam hal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan | Dalam hal Pengadaan Tanah untuk |

<sup>2</sup> Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 telah disisipkan Pasal 19A. Pasal 19A merupakan pasal tambahan dalam Pasal 123 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini telah dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>3</sup> Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 telah disisipkan Pasal 19B. Pasal 19B merupakan pasal tambahan dalam Pasal 123 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini telah dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

| UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                     | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umum yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektare dilakukan langsung antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1), penetapan lokasi dilakukan oleh bupati/wali kota. | Kepentingan Umum yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektare dilakukan langsung antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1), penetapan lokasi dilakukan oleh bupati/wali kota. |

**Pasal 19C<sup>4</sup>**

| UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;</li> <li>pertimbangan teknis;</li> <li>di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan;</li> <li>di luar kawasan gambut/semipadan pantai; dan</li> <li>analisis mengenai dampak lingkungan hidup.</li> </ol> | Setelah penetapan lokasi Pengadaan Tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;</b></li> <li>pertimbangan teknis;</li> <li>di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan;</li> <li>di luar kawasan gambut/semipadan pantai; dan</li> <li>analisis mengenai dampak lingkungan hidup.</li> </ol> |

**Pasal 24**

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                    | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                             | UU 6/2023                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) <b>diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.</b> | (1) Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan untuk <b>jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</b> | (1) Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 |

<sup>4</sup> Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 telah disisipkan Pasal 19C. Pasal 19C merupakan pasal tambahan dalam Pasal 123 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini telah dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

| UU Pengadaan Tanah | UU 11/2020                                                                                                                                   | UU 6/2023                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                              | (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.                                                                                              |
|                    | (2) Permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku penetapan lokasi berakhir. | (2) Permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku penetapan lokasi berakhir |

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan Tanah

##### Paragraf 2 Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, serta Pemanfaatan Tanah

##### Pasal 28

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                          | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UU 6/2023                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:<br>a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan<br>b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan | (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:<br>a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan<br>b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan | (1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:<br>a. pengukuran dan |

| <b>UU Pengadaan Tanah</b>                                                                                                                                                                       | <b>UU 11/2020</b>                                                                                                                                                                         | <b>UU 6/2023</b>                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanah                                                                                                                                                                                           | Tanah.                                                                                                                                                                                    | pemetaan bidang per bidang tanah; dan<br><br>b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.                                                                             |
| (2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. | (2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. | (2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. |
|                                                                                                                                                                                                 | (3) <b>Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh penyurvei berlisensi.</b>                             | (3) Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh penyurvei berlisensi.                                    |

**Paragraf 3**  
**Penilaian Ganti Kerugian**

**Pasal 34**

| <b>UU Pengadaan Tanah</b>     | <b>UU 11/2020</b>             | <b>UU 6/2023</b> |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| (1) Nilai Ganti Kerugian yang | (1) Nilai Ganti Kerugian yang | (1) Nilai Ganti  |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                   | UU 11/2020                                                                                                                                                                             | UU 6/2023                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan Hai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. | dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. | Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 |
| (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.                  | (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan disertai dengan berita acara.           | (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan disertai dengan berita acara.                        |
| (3) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.                                   | (3) <b>Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.</b>                                           | (3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.                                                               |
|                                                                                                                                                                                      | (4) <b>Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.</b>                                                   | (4) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk menetapkan                                                                                               |

| UU Pengadaan Tanah | UU 11/2020                                                                                                                                                                                | UU 6/2023                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                           | bentuk Ganti Kerugian.                                                                                                                                                                            |
|                    | (5) Musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bersama dengan Penilai dengan para Pihak yang Berhak. | (5) Musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerrrgian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh <b>ketua pelaksana</b> Pengadaan Tanah bersama dengan Penilai dengan para Pihak yang Berhak. |

## Pasal 36

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                         | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                         | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:<br>a. uang;<br>b. tanah pengganti;<br>c. permukiman kembali;<br>d. kepemilikan saham; atau<br>e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. | (1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:<br>a. uang;<br>b. tanah pengganti;<br>c. pemukiman kembali;<br>d. kepemilikan saham; atau<br>e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.                      | (1) Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:<br>a. uang;<br>b. tanah pengganti;<br>c. pemukiman kembali;<br>d. kepemilikan saham; atau<br>e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. |
|                                                                                                                                                                                                            | (2) <b>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana                                             |

| UU Pengadaan Tanah | UU 11/2020 | UU 6/2023                                                                                                       |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            | dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah.</u></b> |

**Paragraf 5  
Pemberian Ganti Kerugian**

**Pasal 42**

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.                                                                                                                 | (1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.                                                                                                | (1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat   |
| (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau</li> <li>b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sedang menjadi objek perkara di</li> </ol> </li> </ol> | (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau</li> <li>b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sedang menjadi</li> </ol> </li> </ol> | (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau</li> <li>b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti</li> </ol> |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                | UU 11/2020                                                                                                                                                                         | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pengadilan;</p> <p>2. masih dipersengketakan kepemilikannya;</p> <p>3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau</p> <p>4. menjadi jaminan di bank</p> | <p>objek perkara di pengadilan;</p> <p>2. masih dipersengketakan kepemilikannya;</p> <p>3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau</p> <p>4. menjadi jaminan di bank</p> | <p>Kerugian:</p> <p>1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;</p> <p>2. masih dipersengketakan kepemilikannya;</p> <p>3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau</p> <p>4. menjadi jaminan di bank.</p> |
|                                                                                                                                                                   | <p>(3) Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p>         | <p>(3) Pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p>                                             |

**Paragraf 6**  
**Pelepasan Tanah Instansi**

**Pasal 46**

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                               | UU 11/2020                                                                                                                                                                                             | UU 6/2023                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali:</p> <p>a. Objek Pengadaan Tanah <b>yang telah berdiri bangunan</b></p> | <p>(1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali:</p> <p>a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai</p> | <p>(1) Pelepasan Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan Ganti Kerugian, kecuali:</p> |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                       | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                    | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>yang dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;</b></p> <p>b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan atau</p> <p>c. Objek Pengadaan Tanah kas desa.</p> | <p>dengan tugas dan fungsi pemerintahan</p> <p>b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau</p> <p>c. Objek Pengadaan Tanah kas desa;</p> | <p>a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan ;</p> <p>b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dan/atau</p> <p>c. Objek Pengadaan Tanah kas desa</p> |
| <p>(2) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>huruf a dan huruf c</b> diberikan dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan atau relokasi.</p>                                                                        | <p>(2) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>huruf a</b> diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi.</p>                                          | <p>(2) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi.</p>                                                                                                    |
| <p>(3) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.</p>                                                                                        | <p>(3) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.</p>                                             | <p>(3) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk</p>                                                                                                                                     |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                    | UU 11/2020                                                                                                                                                                       | UU 6/2023                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.                                                                                                                                             |
| (4) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). | (4) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.              | (4) Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36               |
|                                                                                                                                                                       | (5) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). | (5) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). |
|                                                                                                                                                                       | (6) Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti.           | (6) Nilai Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian Penilai atas harta benda wakaf yang diganti.           |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

## Pasal 8

| <b>UU Pengadaan Tanah</b>                                                                                                                                                | <b>UU 11/2020</b> | <b>UU 6/2023</b>                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                 | Cukup jelas.      | Ayat (1)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                 |
| Ayat (2)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                 |                   | Ayat (2)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                 |
| Ayat (3)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                 |                   | Ayat (3)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                 |
| Ayat (4)<br>Huruf a<br><br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br><br><b>Mekanisme pinjam pakai kawasan hutan digunakan khusus untuk proyek-proyek yang sifatnya tidak permanen.</b> |                   | Ayat (4)<br>Huruf a<br><br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br><br><b>Mekanisme pinjam pakai kawasan hutan digunakan khusus untuk proyek-proyek yang sifatnya tidak permanen.</b> |

## Pasal 10

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huruf a<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Huruf a<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Huruf a<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huruf b<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Huruf b<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Huruf b<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air juga untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing) atau lumpur sehingga terbentuk waduk. Yang dimaksud dengan "bendung" adalah tanggul untuk menahan air di sungai, tepi laut, dan sebagainya. | Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air juga untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing) atau lumpur sehingga terbentuk waduk. Yang dimaksud dengan "bendung" adalah tanggul untuk menahan air di sungai, tepi laut, dan sebagainya. | Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air juga untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing) atau lumpur sehingga terbentuk waduk.<br><br>Yang dimaksud dengan "bendung" adalah tanggul untuk menahan air di sungai, tepi laut, dan sebagainya. |
| Huruf d<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Huruf d<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Huruf d<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huruf e<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Huruf e<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Huruf e<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huruf f<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Huruf f<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Huruf f<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huruf g<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Huruf g<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Huruf g<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huruf h<br>Yang dimaksud dengan "sampah" adalah sampah sesuai dengan undang-undang yang mengatur                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Huruf h<br>Yang dimaksud dengan "sampah" adalah sampah sesuai dengan undang-undang yang mengatur                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Huruf h<br>Yang dimaksud dengan "sampah" adalah sampah sesuai dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                 | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pengelolaan sampah.                                                                                                                                                                                                                                                | pengelolaan sampah.                                                                                                                                                                                                                                                       | undang-undang mengenai pengelolaan sampah.                                                                                                                                                                                                                         |
| Huruf i<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                            | Huruf i<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                   | Huruf i<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huruf j<br>Yang dimaksud "fasilitas keselamatan umum" adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor. | Huruf j<br>Yang dimaksud "fasilitas keselamatan umum" adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor.        | Huruf j<br>Yang dimaksud "fasilitas keselamatan umum" adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor. |
| Huruf k<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                            | Huruf k<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                   | Huruf k<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huruf l<br>Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau publik" adalah ruang terbuka hijau sesuai dengan undang-undang yang mengatur penataan ruang.                                                                                                                  | Huruf l<br><b>Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" digunakan antara lain untuk kepentingan keagamaan atau beribadah.</b><br><br>Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau publik" adalah ruang terbuka hijau sesuai dengan undang-undang yang mengatur penataan ruang. | Huruf l<br>Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial" digunakan antara lain untuk kepentingan keagamaan atau beribadah.<br><br>Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau publik" adalah ruang terbuka hijau sesuai dengan undang-undang yang mengatur penataan ruang. |
| Huruf m                                                                                                                                                                                                                                                            | Huruf m                                                                                                                                                                                                                                                                   | Huruf m                                                                                                                                                                                                                                                            |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                          | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                  | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                | Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Huruf n</p> <p>Yang dimaksud dengan "kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa" adalah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan lain.</p> | <p>Huruf n</p> <p>Yang dimaksud dengan "kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa" adalah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan lain.</p> | <p>Huruf n</p> <p>Yang dimaksud dengan "kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Desa" adalah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan unit pelaksana teknis lembaga pemasyarakatan lain.</p> |
| <p>Huruf o</p> <p>Yang dimaksud dengan "perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah" adalah perumahan masyarakat yang dibangun di atas tanah <b>Pemerintah</b> atau Pemerintah Daerah dan kepada penghuninya diberikan status rumah sewa.</p>                          | <p>Huruf o</p> <p>Yang dimaksud dengan "perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah" adalah perumahan masyarakat yang dibangun di atas tanah <b>Pemerintah Pusat</b> atau Pemerintah Daerah dan kepada penghuninya diberikan status rumah sewa.</p>                    | <p>Huruf o</p> <p>Yang dimaksud dengan "perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah" adalah perumahan masyarakat yang dibangun di atas tanah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan kepada penghuninya diberikan status rumah sewa.</p>                                  |
| <p>Huruf p</p> <p>Cukup jelas.</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Huruf p</p> <p>Cukup jelas.</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Huruf p</p> <p>Cukup jelas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Huruf q</p> <p>Cukup jelas.</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Huruf q</p> <p>Cukup jelas.</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Huruf q</p> <p>Cukup jelas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Huruf r</p> <p>Yang dimaksud dengan "pasar umum dan lapangan parkir umum" adalah pasar dan lapangan parkir yang direncanakan, dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh</p>                                                                                              | <p>Huruf r</p> <p>Yang dimaksud dengan "pasar umum dan lapangan parkir umum" adalah pasar dan lapangan parkir yang direncanakan, dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh</p>                                                                                              | <p>Huruf r</p> <p>Yang dimaksud dengan "pasar umum dan lapangan parkir umum" adalah pasar dan</p>                                                                                                                                                                                  |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                      | UU 11/2020                                                                                                                                                                                    | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemerintah</b> dan/atau Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta. | <b>Pemerintah Pusat</b> dan/atau Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta. | lapangan parkir yang direncanakan, dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. |
|                                                                                                                                                                                         | Huruf s<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                       | Huruf s<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                         | Huruf t<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                       | Huruf t<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                         | Huruf u<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                       | Huruf u<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                         | Huruf v<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                       | Huruf v<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                         | Huruf w<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                       | Huruf w<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                         | Huruf x<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                       | Huruf x<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                             |

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 19

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                    | UU 11/2020                                                                                                                                                               | UU 6/2023                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayat (1)<br><b>Dalam Konsultasi Publik, Instansi yang memerlukan tanah menjelaskan antara lain mengenai rencana pembangunan dan cara penghitungan</b> | Ayat (1)<br><b>Yang dimaksud dengan "pengelola dan pengguna Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-</b> | Ayat (1)<br>Huruf a<br><br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br><br>Yang dimaksud dengan "pengelola |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                              | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ganti Kerugian yang akan dilakukan oleh Penilai.                                                                                                                                                                                                                                | undangan di bidang perbendaharaan negara.                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>barang milik negara/barang milik daerah" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan "pengguna barang milik negara/ barang milik daerah" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara.</p> |
| <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan "masyarakat yang terkena dampak" misalnya masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi Pengadaan Tanah.</p>                                                                                                                        | <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan "masyarakat yang terkena dampak" misalnya masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi Pengadaan Tanah.</p>                                                                                                                                         | <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan "masyarakat yang terkena dampak" misalnya masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi Pengadaan Tanah.</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan "surat kuasa" adalah surat kuasa untuk mewakili Konsultasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "dari dan oleh Pihak yang Berhak" adalah penerima kuasa dan pemberi kuasa sama-</p> | <p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan "surat kuasa" adalah surat kuasa untuk mewakili Konsultasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "dari dan oleh Pihak yang Berhak" adalah penerima kuasa dan pemberi kuasa sama-sama berasal dari</p> | <p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan "surat kuasa" adalah surat kuasa untuk mewakili Konsultasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Yang dimaksud dengan "dari dan oleh Pihak yang Berhak" adalah penerima kuasa dan pemberi kuasa sama-sama berasal dari</p>                                                               |

| <b>UU Pengadaan Tanah</b>            | <b>UU 11/2020</b>               | <b>UU 6/2023</b>         |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| sama berasal dari Pihak yang Berhak. | Pihak yang Berhak.              | Pihak yang Berhak.       |
| Ayat (4)<br>Cukup jelas.             | Ayat (4)<br>Cukup jelas.        | Ayat (4)<br>Cukup jelas. |
| Ayat (5)<br>Cukup jelas.             | Ayat (5)<br>Cukup jelas         | Ayat (5)<br>Cukup jelas  |
| Ayat (6)<br>Cukup jelas.             | Ayat (6)<br>Cukup jelas.        | Ayat (6)<br>Cukup jelas. |
|                                      | Ayat (7)<br><b>Cukup jelas.</b> | Ayat (7)<br>Cukup jelas. |
|                                      | Ayat (8)<br><b>Cukup jelas.</b> | Ayat (8)<br>Cukup jelas. |

Pasal 19A  
Cukup Jelas.

Pasal 19B  
Cukup Jelas.

Pasal 19C  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 28

| <b>UU Pengadaan Tanah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>UU 11/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>UU 6/2023</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Pihak yang Berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek Pengadaan Tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. | Ayat (1)<br>Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Pihak yang Berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek Pengadaan Tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. | Ayat (1)<br>Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Pihak |

| UU Pengadaan Tanah | UU 11/2020                      | UU 6/2023                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                 | yang Berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/ memiliki tanah. Objek Pengadaan Tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. |
|                    | Ayat (2)<br><b>Cukup jelas.</b> | Ayat (2)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                 |
|                    | Ayat (3)<br><b>Cukup jelas.</b> | Ayat (3)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                 |

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 36

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                     | UU 11/2020                                                                                                                                                                                            | UU 6/2023                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huruf a<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                | Ayat (1)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                   | Ayat (1)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                   |
| Huruf b<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                | Huruf b<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                               | Huruf b<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                               |
| Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "permukiman kembali" adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada Pihak yang Berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah. | Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "pemukiman kembali" adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada Pihak yang Berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah. | Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "pemukiman kembali" adalah proses kegiatan penyediaan tanah pengganti kepada Pihak yang Berhak ke lokasi lain sesuai dengan kesepakatan dalam proses Pengadaan Tanah. |
| Huruf d<br>Yang dimaksud dengan " <b>bentuk</b> ganti kerugian <b>melalui</b> kepemilikan saham" adalah penyertaan saham dalam                                                                         | Huruf d<br>Yang dimaksud dengan "Ganti Kerugian <b>dalam bentuk</b> kepemilikan saham" adalah penyertaan saham dalam                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/ atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak.</p> <p>Huruf e</p> <p>Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.</p> | <p>kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak.</p> <p>Huruf e</p> <p>Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.</p> | <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan <b>"kepemilikan saham"</b> adalah penyertaan saham dalam kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum terkait dan/atau pengelolaannya yang didasari kesepakatan antarpihak.</p> <p>Huruf e</p> <p>Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak misalnya gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ayat (2)</b><br><b>Cukup jelas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ayat (2)</b><br><b>Cukup jelas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Pasal 40

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian. Apabila berhalangan, Pihak yang Berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian. Yang berhak antara lain: | Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian. Apabila berhalangan, pihak yang Berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian. Yang berhak antara lain:<br>a. pemegang hak atas tanah; | Pemberian Ganti Kerugian pada prinsipnya harus diserahkan langsung kepada Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian. Apabila berhalangan, <b>Pihak</b> yang Berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli waris. Penerima |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. pemegang hak atas tanah;<br/> b. pemegang hak pengelolaan;<br/> c. nadzir, untuk tanah wakaf;<br/> d. pemilik tanah bekas milik adat;<br/> e. masyarakat hukum adat;<br/> f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;<br/> g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau<br/> h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.</p> <p>Pada ketentuannya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang Hak atas Tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya, sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan.</p> <p>Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.</p> <p>Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang</p> | <p>b. pemegang hak pengelolaan;<br/> c. nadzir, untuk tanah wakaf;<br/> d. pemilik tanah bekas milik adat;<br/> e. masyarakat hukum adat;<br/> f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik <b>antara lain tanah terlantar, tanah bekas hak barat.</b><br/> g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau<br/> h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.</p> <p><b>Yang dimaksud dengan "pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik" adalah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penguasaan tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. tidak ada keberatan dari Masyarakat Hukum Adat, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, atau pihak lain atas penguasaan Tanah baik sebelum maupun selama pengumuman berlangsung; dan</li> <li>3. penguasaan dibuktikan dengan kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya;</li> </ol> <p>Pada ketentuannya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang Hak atas Tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya, sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk tanah</p> | <p>kuasa hanya dapat menerima kuasa dari satu orang yang berhak atas Ganti Kerugian.</p> <p>Yang berhak antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemegang hak atas tanah;</li> <li>b. pemegang hak pengelolaan;</li> <li>c. nadzir, untuk tanah wakaf;</li> <li>d. pemilik tanah bekas milik adat;</li> <li>e. masyarakat hukum adat;</li> <li>f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik antara lain tanah terlantar, tanah bekas hak barat;</li> <li>g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau</li> <li>h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.</li> <li>i. Pada ketentuannya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang Hak atas Tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya, sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Ganti Kerugian atas tanah hak</li> </ol> |

| UU Pengadaan Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                    | pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. | ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak yang telah habis jangka waktunya yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang bersangkutan, pihak yang menguasai tanah negara berdasarkan sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin mengkhuni. | Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin mengkhuni.                                                                                                                                                                                               | Yang dimaksud dengan "pemegang dasar penguasaan atas tanah" adalah pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan atas tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang akta jual beli atas Hak atas Tanah yang belum dibalik nama, pemegang akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikat, dan pemegang surat izin mengkhuni                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, Ganti Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.                                                                                                                                                                                                      | Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, ganti rugi diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| UU Pengadaan Tanah | UU 11/2020 | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            | Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, ganti rugi diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. |

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

## C. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

### Pasal 175

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

| UU 30/2014                                                                                                                                                                 | UU 11/2020                                                                                                                                                                 | UU 6/2023                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.                                   | 1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.                                   | 1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.                                   |
| 2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. | 2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. | 2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. |
| 3. Badan dan/atau Pejabat                                                                                                                                                  | 3. Badan dan/atau Pejabat                                                                                                                                                  | 3. Badan dan/atau                                                                                                                                                          |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                      | UU 11/2020                                                                                                                                                                                      | UU 6/2023                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.                                                             | Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.                                                             | Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.                                                      |
| 4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.                                                          | 4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.                                                          | 4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.                                                          |
| 5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan  | 5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. | 5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. |
| 6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. | 6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. | 6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya                                           |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                                                                                                         | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                            | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | untuk bertindak dalam ranah hukum publik.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. | <b>7. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.</b>                                                | <b>7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.</b> |
| 8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.                              | 8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. | 8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.                                     |
| 9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau                                                                                                                                                                                                            | 9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan                                                                                                                                                                     | 9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau                                                                                                                                                                                                                                                     |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                                                                                                    | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                          | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. | oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. | Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. |
| 10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.                                                                                       | 10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.                                                                             | 10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.                                                                                                                         |
| 11. Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.                                                                                                                                       | 11. Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.                                                                                                                             | 11. Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau                                                                                                                                                                                                        |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                        | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | memanfaatkan media elektronik.                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya. | 12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu Salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.                                                                         | 12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.                                                             |
| 13. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya. | 13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.             | 13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan. |
| 14. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya. | 14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang | 14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam                                                                                              |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                                               | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                               | UU 6/2023                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | <b>dibuat dan/atau dilakukannya.</b>                                                                                                                                                                                                     | penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.                                                   |
| 15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.                                                                                                          | 15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.                                                                                                                          | 15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.                                                                          |
| 16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.                          | 16. Upaya Administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.                                                 | 16. Upaya Administratif adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. |
| 17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam | 17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan | 17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat                                   |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                     | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                  | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| penyelenggaraan pemerintahan.                                                                                                                                                  | pemerintahan.                                                                                                                                                                                                                                                               | Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.                                                                                                                                               |
| 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.                                                                                                                            | 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.                                                                                                                                                                                                                         | 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.                                                                                                                                                                                           |
| 19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                              | 19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                |
|                                                                                                                                                                                | <b>19a. Standar adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang atau Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b> | <b>19.a</b> Standar adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang atau Lembaga yang diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai wujud persetujuan atas pernyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                     | 21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                     | 21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan                                                                                                                   |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                                                                              | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                              | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>peraturan perundang-undangan.</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| 22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.                                                                                   | 22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.                                                                                   | 22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.                                                                                  |
| 23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. | 23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. | 23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. |
| 24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.              | 24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.              | 24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan                                                               |

| UU 30/2014                                                                                                    | UU 11/2020                                                                                                    | UU 6/2023                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                               | tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.                                                             |
| 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. | 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. | 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara |

## BAB VI DISKRESI

### Bagian Ketiga Persyaratan Diskresi

#### Pasal 24

| UU 30/2014                                                                     | UU 11/2020                                                                     | UU 6/2023                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:          | Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:          | Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:          |
| d. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); | j. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); | a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); |
| e. <b>tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</b>    | k. <b>sesuai dengan AUPB;</b>                                                  | b. sesuai dengan AUPB;                                                         |
| f. sesuai dengan AUPB;                                                         | l. <b>berdasarkan alasan-alasan yang objektif;</b>                             | c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;                                    |
| g. <b>berdasarkan alasan-alasan yang objektif;</b>                             | m. <b>tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan</b>                           | d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan                                  |
| h. <b>tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan</b>                           | n. <b>dilakukan dengan iktikad baik.</b>                                       | e. dilakukan dengan iktikad baik.                                              |
| i. <b>dilakukan dengan iktikad baik.</b>                                       |                                                                                |                                                                                |

## BAB VII PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

### Bagian Keempat

## Keputusan Berbentuk Elektronik

## Pasal 38

| UU 30/2014                                                                                                                                                              | UU 11/2020                                                                                                                                                              | UU 6/2023                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.                                                                                   | (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.                                                                                   | (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.                                                                                   |
| (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.                                 | (2) Keputusan <b>Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</b>       | (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap Keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat.              |
| (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. | (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. | (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan. |
| (4) <b>Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik.</b>                                          | (4) <b>Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk tertulis.</b>                                                            | (4) Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk tertulis.                                                                   |
| (5) <b>Dalam hal terdapat perbedaan antara</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |

| UU 30/2014                                                                                                                  | UU 11/2020 | UU 6/2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Keputusan dalam bentuk elektronik dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis. |            |           |
| (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.                             |            |           |

| UU 30/2014                                     | UU 11/2020                                              | UU 6/2023                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bagian Kelima<br>Izin, Dispensasi, dan Konsesi | Bagian Kelima<br>Izin, Standar, Dispensasi, dan Konsesi | Bagian Kelima<br>Izin, Standar, Dispensasi, dan Konsesi |

## Pasal 39

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                        | UU 11/2020                                                                                                                                                                                        | UU 6/2023                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.                  | (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, <b>Standar</b> , Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. | (1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:<br>a. <b>diterbitkan persetujuan</b> sebelum kegiatan dilaksanakan; dan<br>b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan | (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:<br>a. <b>persetujuan diterbitkan</b> sebelum kegiatan                                                                   | (2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin apabila:<br>a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan                                                                  |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                               | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                              | dilaksanakan; dan<br>b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                    | dilaksanakan; dan<br>b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                              |
| (3) <b>Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila:</b><br>a. <b>diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan</b><br>b. <b>kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.</b>                               | (3) <b>Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Standar apabila:</b><br>a. <b>persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan</b><br>b. <b>kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan telah yang terstandardisasi.</b> | (3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Standar apabila:<br>a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan<br>b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang telah terstandardisasi |
| (4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila:<br>a. <b>diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan;</b><br>b. <b>persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,</b> | (4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila:<br>a. <b>persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan</b><br>b. <b>kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan</b>                                  | (4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Dispensasi apabila<br>a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan<br>b. kegiatan yang akan                                                           |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dan/atau swasta; dan<br>c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.                                                                                                                                                                           | pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dilaksanakan merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. | (5) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila:<br>a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan;<br>b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan<br>c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. | (5) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi apabila:<br>a. persetujuan diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan;<br>b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan pihak badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta; dan<br>c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. |

| UU 30/2014                                                                  | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara. | (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. | (6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|                                                                             | (7) Standar berlaku sejak pemohon menyatakan komitmen pemenuhan elemen standar.                                                                                                                                                                                                           | (7) Standar berlaku sejak pemohon menyatakan komitmen pemenuhan elemen Standar.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                             | (8) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.                                                                                                                                                                                                               | (8) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara.                                                                                                                                                                                                               |

**Pasal 39A<sup>5</sup>**

| UU 11/2020                                                                                                                                     | UU 6/2023                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi. | (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi. |

<sup>5</sup> Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 telah disisipkan Pasal 39A. Pasal 39A merupakan pasal tambahan dalam Pasal 175 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjayang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan atau dilakukan oleh profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang pengawasan.   | (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan atau dilakukan oleh profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang pengawasan. |
| (3) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan mekanisme pembinaan dan pengawasan atas Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi yang dapat dilakukan oleh profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden <sup>6</sup> . | (3) Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan mekanisme pembinaan dan pengawasan atas Izin, Standar, Dispensasi, dan/atau Konsesi yang dapat dilakukan oleh profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.             |

## BAB IX KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

### Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan Pasal 53

| UU 30/2014                                                                                                                                                    | UU 11/2020                                                                                                                                                           | UU 6/2023                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.               | (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.            | (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>maka</b> Badan dan/atau Pejabat | (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib | (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana                                                        |

<sup>6</sup>Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                                                        | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                            | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu <b>paling lama 10 (sepuluh)</b> hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.          | menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling <b>lama 5 (lima)</b> hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.                                                                    | dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan           |
| (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. | (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. | (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. |
| (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).                                                                                            | (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.                                                   | (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,                                                                                                |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                                       | UU 11/2020                                                                                                                                                                                              | UU 6/2023                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.                                                                                                                                               |
| (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.                                                              | (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden. <sup>7</sup> | (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden. |
| (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

<sup>7</sup> Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

| UU 30/2014  | UU 11/2020  | UU 6/2023   |
|-------------|-------------|-------------|
| Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas |

## Pasal 24

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                  | UU 11/2020                                                                                                                                                                                   | UU 6/2023                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huruf a<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                     | Huruf a<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                      | Huruf a<br>Cukup jelas                                                                                                                                                                     |
| Huruf b<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                     | Huruf b<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                      | Huruf b<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                    |
| Huruf c<br><b>Cukup jelas.</b>                                                                                                                                                              | Huruf c<br><b>Yang dimaksud dengan "alasan-alasan objektif" adalah alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB.</b> | Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang objektif" adalah alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB. |
| Huruf d<br><b>Yang dimaksud dengan "alasan-alasan objektif" adalah alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan AUPB</b> | Huruf d<br><b>Cukup jelas.</b><br><br>(7)                                                                                                                                                    | Huruf d<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                    |
| Huruf e<br><b>Cukup jelas.</b>                                                                                                                                                              | Huruf e<br><b>Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.</b>            | Huruf e<br>Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB                  |
| Huruf f<br>Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |

## Pasal 38

| UU 30/2014 | UU 11/2020 | UU 6/2023 |
|------------|------------|-----------|
| Ayat (1)   | Ayat (1)   | Ayat (1)  |

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UU 11/2020                                                                                                                                                          | UU 6/2023                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. | Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik |
| <p>Ayat (2)</p> <p><b>Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan, dokumen asli akan dikirimkan apabila dibutuhkan penegasan mengenai penanggung jawab dari Pejabat Pemerintahan yang menyimpan dokumen asli. Jika terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronik baik dari pihak Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Warga Masyarakat, maka kedua belah pihak saling memberitahukan secepatnya.</b></p> | <p>Ayat (2)</p> <p><b>Cukup jelas.</b></p>                                                                                                                          | <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>                                                                                                                                 |
| <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>                                                                                                                                 | <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas</p>                                                                                                                                 |
| <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p>                                                                                                                                 | <p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas</p>                                                                                                                                 |
| <p>Ayat (5)</p> <p>Cukup jelas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |

| UU 30/2014               | UU 11/2020 | UU 6/2023 |
|--------------------------|------------|-----------|
|                          |            |           |
| Ayat (6)<br>Cukup jelas. |            |           |

## Pasal 39

| UU 30/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayat (1)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ayat (1)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ayat (1)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br><br>Huruf b<br><br>Yang dimaksud dengan "memerlukan perhatian khusus" adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh Warga Masyarakat, dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan. | Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br><br>Huruf b<br><br>Yang dimaksud dengan "memerlukan perhatian khusus" adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh Warga Masyarakat, dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan. | Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br><br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "memerlukan perhatian khusus" adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh Warga Masyarakat, dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan pengawasan. |
| Ayat (3)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ayat (3)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ayat (3)<br>Cukup jelas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ayat (4)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ayat (4)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br><br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "swasta" meliputi perorangan, korporasi yang berbadan hukum di                                                                                                                                                                                      | <b>Ayat (4)<br/>Cukup jelas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| UU 30/2014               | UU 11/2020                                                  | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <b>Indonesia, dan asing.</b><br><br>Huruf c<br>Cukup jelas. |                                                                                                                                                                                                                   |
| Ayat (5)<br>Cukup jelas. | Ayat (5)<br>Cukup jelas.                                    | Ayat (5)<br><b>Huruf a</b><br>Cukup jelas.<br><br><b>Huruf b</b><br>Yang dimaksud dengan "swasta" meliputi perorangan, korporasi yang berbadan hukum di Indonesia, dan asing<br><br><b>Huruf c</b><br>Cukup jelas |
| Ayat (6)<br>Cukup jelas. | Ayat (6)<br>Cukup jelas.                                    | Ayat (6)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                          |
|                          |                                                             | Ayat (7)<br>Cukup jelas.                                                                                                                                                                                          |
|                          |                                                             | Ayat (8)<br>Cukup jelas                                                                                                                                                                                           |

Pasal 39A<sup>89</sup>

| UU 11/2020   | UU 6/2023    |
|--------------|--------------|
| Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Pasal 53

| UU 30/2014   | UU 11/2020   | UU 6/2023    |
|--------------|--------------|--------------|
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

#### D. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

##### Pasal 176

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 39A merupakan ketentuan penjelasan yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Beberapa ketentuan dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 diubah sebagai berikut:

### **BAB III URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren**

##### **Pasal 16<sup>10</sup>**

| <b>UU 23/2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>UU 11/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>UU 6/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:</p> <p>a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan</p> <p>b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> | <p>(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:</p> <p>a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan</p> <p>b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> | <p>(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:</p> <p>a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan</p> <p>b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan</p> |

<sup>10</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a <b>berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.</b> | (2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a <b>mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (<i>good practices</i>).</b>                                                                                                                                                                          | (2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu atau mengadopsi praktik yang baik ( <i>good practices</i> ).                                                                                                                                                                               |
| (3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.                                                                                                                                                                                          | (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. | (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk ketentuan peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. |
| (4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus                                                                                                                                                                                                        | (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah                                                                                                                                                                                     | (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>UU 23/2014</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>UU 11/2020</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>UU 6/2023</b>                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dikoordinasikan dengan kementerian terkait.</b>                                                                                                                                                                                             | <b>yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</b>                                                                                                                                                                                         | sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.                                                                                                                                        |
| <b>(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.</b> | <b>(5) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.</b>                                                                                              | <b>(5) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.</b>                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(6) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.</b>                                                                   | <b>(6) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.</b>                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(7) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.</b> | <b>(7) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.</b> |

## BAB IX PERDA DAN PERKADA

### Bagian Ketiga

## Pembatalan Perda dan Perkada

Pasal 250<sup>11</sup>

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, <b>kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</b>                                                                                                                                                                                                                  | Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, <b>asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.</b> | Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan |
| (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;<br>b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;<br>c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;<br>d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau<br>e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Pasal 251<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

<sup>12</sup> Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.                                                                                                                                                                                 | Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. | Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. |
| (2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UU 11/2020 | UU 6/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.                                                                                                |            |           |
| (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.                                                                      |            |           |
| (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah mencabut Perkada dimaksud.                                                                               |            |           |
| (7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan |            |           |

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UU 11/2020 | UU 6/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |
| (8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima. |            |           |

**Pasal 252<sup>13</sup>**

| UU 23/2014                            | UU 11/2020                            | UU 6/2023                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah | (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah | (1) Penyelenggara Pemerintahan |

<sup>13</sup> Pasal 252 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                                                                 | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                               | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.                                  | provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda <b>yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.</b>                                                                               | Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai sanksi.                                                                         |
| (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:<br><br>a. sanksi administratif; dan/atau<br><br>b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;                                                                                        | (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.                                                                                                                                                               | (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.                                                                                                                                                         |
| (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. | (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan <b>hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b> | (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur ddengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan                                                                                                                | (4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan Perda mengenai pajak daerah                                                                                                                | (4) Dihapus.                                                                                                                                                                                                                       |

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UU 11/2020                                                                                                                                             | UU 6/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota.                                                                                                                                                                                                                                         | dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomer register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. |           |
| (5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan. |                                                                                                                                                        |           |

## BAB X

### PEMBANGUNAN DAERAH

#### Bagian Kedua Umum

#### Pasal 260<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                  | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                     | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.                                             | (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional <b>di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.</b> | (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. |
| (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. | (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.                                                                                    | (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah                                                                              |

## BAB XI KEUANGAN DAERAH

### Bagian Kelima Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

#### Paragraf 1 Pendapatan

melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

**Pasal 292A**

| <b>UU 11/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>UU 6/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran. | (1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli Daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran. |
| (2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> . <sup>15</sup>                                                                                                                              | (2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam <b><u>Peraturan Pemerintah</u></b> .                                                                                                                                            |

**Paragraf 3  
Pembiayaan**

**Pasal 300<sup>16</sup>**

| <b>UU 23/2014</b>                                                         | <b>UU 11/2020</b>                                                         | <b>UU 6/2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, | (1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, | <b>dihapus.</b>  |

<sup>15</sup> Diantara Pasal 292 dan Pasal 293 telah disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 292A. Pasal 292A merupakan pasal tambahan dalam Pasal 176 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

<sup>16</sup> Pasal 300 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UU 6/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.                                                                                                                                                                                                                             | Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| (2) Kepala daerah <b>dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.</b> | (2) Kepala daerah <b>dapat menerbitkan obligasi Daerah dan/ atau sukuk Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.</b> |           |

### BAB XIII

#### PALAYANAN PUBLIK

##### Bagian Kedua

##### Manajemen Pelayanan Publik

##### Pasal 349<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Pasal 349 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

| UU 23/2014                                                                                                                             | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                               | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah. | (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah <b>dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat.</b> | (1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat. |
| (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan <b>Perda.</b>                                                  | (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan <b>Peraturan Daerah.</b>                                                                                                                                         | (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan <b>Perda.</b>                                                                                                                                             |
| (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.                    | (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.                                                                                                                      | (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.                                                                                                               |

**Pasal 350<sup>18</sup>**

| UU 23/2014 | UU 11/2020 | UU 6/2023 |
|------------|------------|-----------|
|------------|------------|-----------|

<sup>18</sup> Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Pasal 176 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

| UU 23/2014                                                                                                                                           | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                    | UU 6/2023                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan <b>perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b>                                  | (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan <b>Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</b> | (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. |
| (2) Dalam memberikan pelayanan <b>perizinan</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.               | (2) Dalam memberikan pelayanan <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.                                                              | (2) Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.                                                              |
| (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. | (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                  | (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                           |
| (4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi                                        | <b>(4) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara</b>                                                                                 | (4) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada                                                                                                                                             |

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                       | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| administratif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat</b>                                                                                                                                                                                            | ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.                                                                                                                                          |
| (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi.                                                                                                                     | (5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.                           | (5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <b>yang terintegrasi</b> sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.                   |
| (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota. | (6) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif. | (6) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan <b>sistem Perizinan Berusaha secara elektronik</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <b>yang terintegrasi</b> dikenai sanksi |

| UU 23/2014 | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | administratif.                                                                                                                                                                                                                           |
|            | (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif.                                                                                      | (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif. |
|            | (8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.                                                                                                                           | (8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.                                      |
|            | (9) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:<br>a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi | (9) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:<br>a. menteri atau                                         |

| UU 23/2014 | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>kewenangan gubernur; atau</p> <p>b.gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.</p>                                                                   | <p>kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau</p> <p>b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.</p> |
|            | <p>(10) Pengambilalihan pemberian Perizinan Berusaha oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p> | <p>(10) Pengambilalihan pemberian Perizinan Berusaha oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri</p>                                                              |

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 402A<sup>19</sup>**

| UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. | Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. |

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 16

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                                                                               | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                     | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayat (1)<br>Cukup jelas<br>Ayat (2)<br><b>Pedoman dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk standarisasi yang berlaku secara nasional, mempermudah penyelenggara Pemerindatan Daerah dan mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b> | Ayat (1)<br>Cukup jelas<br>Ayat (2)<br><b>Yang dimaksud dengan “praktik yang baik (<i>good practices</i>)” adalah sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional.</b><br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. | Ayat (1)<br>Cukup jelas<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan “praktik yang baik ( <i>good practices</i> )” adalah sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4) |

<sup>19</sup> Diantara Pasal 402 dan Pasal 403 telah disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 402A. Pasal 402A merupakan pasal tambahan dalam Pasal 176 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini telah dilaksanakan melalui peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

| UU 23/2014                              | UU 11/2020                                                                      | UU 6/2023                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>tanpa mengurangi Otonomi Daerah.</b> | Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (7)<br>Cukup jelas | Cukup jelas.<br>Ayat (5)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (6)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (7)<br>Cukup jelas |

## Pasal 250

| UU 23/2014                                                                                                                                                                        | UU 11/2020                                                                                                                   | UU 6/2023                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ayat (1)</b><br>Yang dimaksud dengan "kesusilaan" dalam ketentuan ini adalah norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur. | <b>Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah putusan pengadilan yang telah diikuti oleh putusan hakim berikutnya.</b> | Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" adalah putusan pengadilan yang telah diikuti oleh putusan hakim berikutnya. |
| <b>Ayat (2)</b><br><b>Cukup Jelas</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                       |

## Pasal 251

| UU 23/2014  | UU 11/2020  | UU 6/2023   |
|-------------|-------------|-------------|
| Cukup jelas | Cukup jelas | Cukup jelas |

## Pasal 252

| UU 23/2014                                                                                                            | UU 11/2020                                                                                                            | UU 6/2023                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ayat (1)<br>Cukup jelas                                                                                               | Ayat (1)<br>Cukup jelas                                                                                               | Ayat (1)<br>Cukup jelas.   |
| Ayat (2)<br>Cukup jelas                                                                                               | Ayat (2)<br>Cukup jelas                                                                                               | Ayat (2)<br>Cukup jelas    |
| Ayat (3)<br>Cukup jelas                                                                                               | Ayat (3)<br>Cukup jelas                                                                                               | Ayat (3)<br>Cukup jelas.   |
| Ayat (4)<br>Cukup jelas                                                                                               | Ayat (4)<br><b>Pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan sebesar uang yang sudah dipungut oleh Daerah.</b> | Ayat (4)<br><b>Dihapus</b> |
| Ayat (5)<br><b>Pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan sebesar uang yang sudah dipungut oleh Daerah.</b> |                                                                                                                       |                            |

## Pasal 260

| UU 23/2014   | UU 11/2020   | UU 6/2023   |
|--------------|--------------|-------------|
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas |

Pasal 292A<sup>20</sup>

| UU 11/2020   | UU 6/2023   |
|--------------|-------------|
| Cukup jelas. | Cukup jelas |

## Pasal 300

| UU 23/2014   | UU 11/2020   | UU 6/2023 |
|--------------|--------------|-----------|
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Dihapus   |

## Pasal 349

| UU 23/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UU 11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UU 6/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "penyederhanaan jenis pelayanan publik" adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan yang di dalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan tersebut.</p> <p>Yang dimaksud dengan "penyederhanaan prosedur pelayanan publik" adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkah-langkah pemberian layanan, sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat.</p> | <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "penyederhanaan jenis pelayanan publik" adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan yang di dalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan tersebut. Yang dimaksud dengan "penyederhanaan prosedur pelayanan publik" adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkah-langkah pemberian layanan, sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat.</p> | <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "penyederhanaan jenis pelayanan publik" adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi 1(satu) jenis pelayanan yang di dalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan tersebut. Yang dimaksud dengan "penyederhanaan prosedur pelayanan publik" adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkah-langkah pemberian layanan,</p> |

<sup>20</sup> Pasal 292A merupakan Pasal tambahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

| UU 23/2014               | UU 11/2020              | UU 6/2023                                                        |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                          |                         | sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada masyarakat. |
| Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Ayat (2)<br>Cukup jelas | Ayat (2)<br>Cukup jelas.                                         |
| Ayat (3)<br>Cukup jelas. | Ayat (3)<br>Cukup jelas | Ayat (3)<br>Cukup jelas                                          |

## Pasal 350

| UU 23/2014   | UU 11/2020   | UU 6/2023    |
|--------------|--------------|--------------|
| Cukup jelas. | Cukup jelas. | Cukup jelas. |

Pasal 402A<sup>21</sup>

| UU 11/2020   | UU 6/2023   |
|--------------|-------------|
| Cukup jelas. | Cukup jelas |

<sup>21</sup> Pasal 402A merupakan Pasal tambahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
2023**